

Lembaga Pendidikan Islam dan Tantangan Masyarakat Muslim dalam Era Global

Oleh Muslih Usa

Peneliti dan Staf pada Departemen Agama Kodya Yogyakarta

Perubahan merupakan suatu proses-aktual yang tidak pernah hilang selama manusia masih hidup di muka bumi ini. Keharusan ini dimungkinkan karena manusia pada dasarnya adalah makhluk kreatif sebagai *sunatullah* atas *cipta, rasa* dan *karsa* yang diberikan *maha pencipta* kepadanya.

Proses kreatif ini, sekaligus merupakan prakarsa positif dalam upaya mengantarkan dirinya untuk meninggalkan keterbelakangan (*underdevelopment of backwardness*), di bidang sosial budaya, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Untuk itu, maka perubahan dapat dinalar menurut asumsi *positive thinking*, karena berdampak positif bagi kemajuan peradaban ma-

nusia sendiri. Bahkan, sejak manusia mulai mengenal lingkungan dan kebudayaan, perubahan justru menjadi satu kebutuhan.

perubahan yang berlangsung, tidak bisa sepenuhnya membawa dampak positif. Di dalamnya juga terkandung dampak negatif bagi lingkungan, baik sosial maupun alam

Sisi yang menjadi persoalan adalah, bahwa perubahan yang berlangsung, tidak bisa sepenuhnya membawa dampak positif. Di dalamnya juga terkandung dampak negatif bagi lingkungan, baik sosial maupun alam. Lebih dari itu, perubahan bahkan juga

merubah pranata sosial yang telah mapan sekalipun. Aspek negatif yang demikian ini, tidak pernah bisa dihindari secara sempurna oleh bangsa manapun juga, apalagi bagi bangsa-bangsa yang sedang dalam masa-masa transisi seperti yang sedang dialami bangsa Indonesia,

dari agraris ke industrial, di tengah perkembangan dunia yang demikian pesat. Dalam masyarakat yang demikian, biasanya akan terjadi perubahan struktural dan kultural serta keterkejutan budaya secara tidak sejalan, atau bahkan saling berbenturan, sehingga terjadi *anomie* terhadap perangkat nilai yang berlaku (*Durkheim, 1964:353*).

Dalam konteks tersebut, bagaimanakah keberadaan umat beragama, sebagai makhluk yang mempunyai keharusan universal untuk percaya, tunduk, dan patuh pada *penciptanya*? Dan apa pula yang harus dilakukan, agar dampak-dampak negatif yang lahir bersamaan dengan yang positif dari suatu perubahan terhadap kehidupan umat beragama, agar tidak justru menjadi bumerang bagi kehidupan manusia yang ditakdirkan sebagai makhluk yang cenderung beragama? Dan terakhir, bagaimanakah keberadaan lembaga pendidikan Islam dalam konteks tersebut?

Posisi Umat Beragama

Suatu hal yang cukup jelas kita saksikan adalah bahwa perubahan yang terjadi di setiap pelosok

kehidupan sosial, telah memberikan kebaikan yang luar biasa bagi umat manusia. Hal ini tampak seperti pada sektor-sektor baik sosial, ekonomi, maupun politik.

Tetapi di balik semua kemajuan-kemajuan yang ada, perubahan juga sekaligus membonceng pengaruh negatif yang tidak mungkin dihindari, dan berdampak luas bagi kehidupan sosial, terutama terhadap kehidupan umat beragama. Sebagaimana yang dikatakan *Emile Durkheim* yang dikutip di atas, bahwa perubahan struktural dan kultural dalam kehidupan sosial, mempunyai pengaruh

kuat terhadap terciptanya proses pengasingan perangkat nilai yang berlaku dalam kehidupan sosial.

Penyebabnya, kata *Kuntowijoyo (1987:-11)*, karena perubahan yang menyumbangkan kemajuan di berbagai sektor itu, juga menciptakan kesenjangan-kesenjangan antara individu dan antara bidang-bidang da-

lam kehidupan sosial itu sendiri. Akibatnya, masyarakat manusia yang ada di dalamnya akan saling bersaing dan berpacu dengan metode-metode pilihan yang dapat mempercepat pencapaian tujuan dalam upaya mobilisasi yang ditempuhnya.

Tetapi di balik semua kemajuan-kemajuan yang ada, perubahan juga sekaligus membonceng pengaruh negatif yang tidak mungkin dihindari, dan berdampak luas bagi kehidupan sosial, terutama terhadap kehidupan umat beragama

Situasi kompetitif ini, selanjutnya dapat kita sebut sebagai suatu proses mengaktualisasi diri dalam perubahan dan umat beragama yang ada di dalamnya, justru terbagi menjadi dua kelompok. *Pertama*, pihak yang memegang teguh sistem nilai yang mereka anut dan sejak lama diakui kebenarannya. Bagi mereka, menunjukkan kepatuhan dan mengedepankan konsistensi terhadap acuan kebahagiaan akhirat, merupakan tinjauan utama dalam mengelola perspektif kehidupannya.

Kedua, kalangan yang lebih mengutamakan keberhasilan dalam mobilisasi. Oleh karenanya, mereka cenderung mengabaikan nilai yang berlaku, terutama yang dianggap dapat menghalangi proses pencapaian tujuan. Proses ini sesuai dengan pergeseran wilayah pemikiran dan pandangan mereka dalam menafsirkan sesuatu yang lebih cenderung menurut nalar, dan atas pendekatan rasional-fungsional.

Di sini kemudian akan timbul ketegangan-ketegangan dan antara satu dengan yang lainnya akan saling menghakimi. Kelompok pertama, akan cenderung mengecam secara pedas kelompok kedua, yang

dianggapnya telah melakukan pelecehan terhadap sistem nilai dalam suatu sistem keyakinan yang dianut. Hal ini akan semakin tegang, manakala kelompok kedua justru tidak menanggapi atau mengabaikan kritik kelompok pertama, yang kemudian memunculkan anggapan bahwa mereka berdiri, berjalan, dan berkehidupan sebagai pembuka kehancuran kehidupan umat beragama.

Indikasi tersebut akan mempunyai arti sebagai awal lahirnya konflik, karena di dalam kehidupan bersama telah terjadi perbedaan kepentingan. Dalam kaitan dengan hal tersebut, *Johan Galtung* (1991:133) menjelaskan, bahwa konflik atau adanya *ketidakselarasan kepentingan* sangat penting diyakini bermula dari perbedaan kepentingan yang kemudian melahirkan *living condition* atau syarat hidup yang sangat berbeda antara masing-masing anggota masyarakat yang sekaligus sebagai umat beragama. Ini menjadi faktor yang menciptakan keadaan *berseberangan* yang lebih jauh.

Di luar kasus bidang sosiologis seperti yang diuraikan di atas, eksistensi umat beragama dalam

konflik atau adanya ketidakselarasan kepentingan sangat penting diyakini bermula dari perbedaan kepentingan yang kemudian melahirkan living condition atau syarat hidup yang sangat berbeda

kaitan dengan keteguhan terhadap sistem keyakinannya, juga terse- rang oleh virus yang lahir dari ke- majuan teknologi informasi. Dalam hal ini, eksposer budaya asing dalam berbagai formulasi termasuk yang utama, seksual dan kekerasan, secara "over dosis" dibawa melalui berbagai media massa (baik cetak maupun elektronik) dan sampai dengan cepat ke segenap pelosok terasing sekalipun, mempunyai an- dil yang besar bagi perubahan peri- laku masyarakat.

Aspek tersebut juga menjadi variabel kunci bagi gugatan atau pendobrakan kon- sistensi umat bera- gama terhadap sis- tem keyakinannya. Sebab, aksentuasi aspek negatifnya ju- ga bermuara pada pembentukan bu- daya global yang le- bh universal dan melemahkan per- tahanan norma bu- daya lokal. Dari si- ni, maka lahir lah pembangkangan (*dissident*) masya- rakat luas terhadap "birokrasi" nilai dan sekaligus norma agama yang telah lama dianutnya.

Kalangan tertentu, dan diduga jumlahnya lebih besar, akan lebih cenderung bersikap demikian, apa- lagi bersamaan dengan itu muncul pula kejenuhan terhadap rutinitas

dalam kehidupannya. Suasana yang diinginkan adalah tercapainya tingkat kepuasan dan mobilitas yang beranjak dari yang sebelu- nya. Pada tahap ini maka sesuatu yang dianggap menghambat (dini- lai tidak fungsional), akan lebih mudah terlanggar atau bahkan ter- lupakan kekuatannya dalam meng- adili manusia pada kehidupan se- telah mati.

Dalam konteks inilah kemudian ditemukan jawaban, bahwa sesung-uhnya posisi kehidupan umat beragama dalam era perubahan global masa kini dan masa datang,

sangatlah riskan dan mengkhawatirkan. Sebab, indikator sema- kin meluasnya pem- bangkangan terha- dap sistem nilai, baik yang bersumber dari peninggalan leluhur maupun yang bera- sal dari sistem keya- kinan seseorang, be- gitu mudah berada di bawah pengaruh dan kungkungan pe- radaban baru yang lebih menjanjikan

indikator semakin meluasnya pembangkangan terhadap sistem nilai, baik yang bersumber dari peninggalan leluhur maupun yang berasal dari sistem keyakinan seseorang, begitu mudah berada di bawah pengaruh dan kungkungan peradaban baru.

duniawiyah, yang secara luas men- jadi dambaan dalam setiap ikhtiar segenap lapisan masyarakat. Untuk itu, maka hal ini jelas harus dian- tisipasi dengan langkah dan strategi yang konsisten serta lebih bersa- haja. Artinya, keharusan dan keam- puhan antisipasi haruslah nyata

dan tidak sekadar berpijak pada asumsi moral dan keampuhan nilai *ilahiyah* yang dikandung agama yang *haq* sekalipun. Saya kira, Tuhan juga akan marah bila agama-Nya tidak dijaga, tidak dipelihara, dan tidak dipatuhi lagi secara konsisten oleh kebanyakan umat manusia di muka bumi ini.

Agama apapun di dunia ini, tidak memiliki keampuhan apa-apa dalam melindungi umatnya agar senantiasa berada dalam kualitas iman dan taqwanya. Hal ini baru mungkin manakala umat itu sendiri selalu menempatkan diri pada wilayah sadar untuk memenuhi keharusan konsistensinya terhadap sistem keyakinannya, dengan selalu tunduk dan patuh pada ajaran agama yang dianutnya.

Ini sejalan dengan dinamika fenomena yang lahir dalam kehidupan manusia yang menantang dan bahkan selalu melahirkan dorongan yang kontradiktif terhadap terhadap nilai ajaran. Ini dipahami sebagai tantangan berat, karena dalam kenyataannya manusia sebagai umat beragama, tidak pernah bisa menghindarinya secara sempurna, sehingga dia lepas atau terjauhkan dari unsur *dis-*

sident (pembangkangan) terhadap ajaran Tuhannya.

Langkah Antisipasi

Memahami tentang betapa sulit dan betapa besarnya tantangan yang dihadapi umat beragama di masa kini dan masa datang, maka mau tidak mau, problema ini harus dihadapi dengan suatu antisipasi yang dapat diterapkan secara konsisten. Sekalipun diyakini bahwa dampak negatif yang terikutsertakan dalam proses pembaharuan (untuk beranjak pada kehidupan yang lebih baik) tidak bisa dihindari

dan diselesaikan secara sempurna, ikhtiar kearah itu haruslah senantiasa mengedepan.

Untuk itu, peran penting tokoh-tokoh dalam kehidupan sosial, harus didayakan secara bersahaja dalam suatu keterpaduan kerjasama yang jelas. Dalam hal ini, keberadaan institusi-institusi dalam jajaran kekuasaan

(negara), juga harus saling mendukung, baik sebagai motivator, fasilitator, maupun mediator, sekaligus sebagai filter terhadap hal-hal kontroversial menurut pandangan agama dan budaya masyarakat.

Ini dipahami sebagai tantangan berat, karena dalam kenyataannya manusia sebagai umat beragama, tidak pernah bisa menghindarinya secara sempurna, sehingga dia lepas atau terjauhkan dari unsur *dissident* (pembangkangan) terhadap ajaran Tuhannya

Dalam kaitannya dengan keperanan para tokoh yang sekaligus sebagai pihak yang operasional, dapat dipersempit menjadi tokoh agama, pendidikan, dan keluarga. Keberadaan mereka dalam menghadapi masalah tersebut, mempunyai korelasi yang cukup tinggi dalam menciptakan penghindaran, perbaikan, dan pemantapan nilai *aqidah* seseorang.

Tidak disinggungnya masyarakat luas sebagai variabel penting lain kalangan yang disebutkan di atas, lebih dikarenakan bahwa payahnya situasi umat beragama sebagaimana yang terlihat sekarang ini, justru lahir dari sikap umum mereka yang mendua. Di samping itu, untuk ciri kasus yang lahir dari pengaruh negatif perubahan, kiranya harus diantisipasi dengan identifikasi keteladanan yang jelas, bukan global sebagaimana yang diharapkan pada masyarakat secara luas.

Tokoh-tokoh agama atau ulama, sampai penghujung dasawarsa terakhir abad ke-20 ini, masih diakui keberadaan oleh masyarakat luas. Kekuasaan moral, keteladanan, dan kewibawaan yang mereka miliki, masih memberikan pengaruh

secara kuat bagi sebagian besar masyarakat. Untuk itu, maka peran kalangan ini tidak boleh terabaikan dari urusan mempersiapkan umat menghadapi kelanjutan era globalisasi.

Pada masa lampau, kewibawaan tokoh agama justru sangat tinggi dalam masyarakat, bahkan melebihi kekuasaan sekuler (Negara). Dalam masyarakat Aceh misalnya, kenyataan ini dapat dilihat dalam masa perjuangannya melawan kaum imperialis. Pada masa ini, persatuan dan motivasi yang tinggi terhadap perjuangan melawan penjajah justru tercipta karena faktor pengaruh kuat kaum ulama.

Tokoh-tokoh agama atau ulama, sampai penghujung dasawarsa terakhir abad ke-20 ini, masih diakui keberadaan oleh masyarakat luas. Kekuasaan moral, keteladanan, dan kewibawaan yang mereka miliki, masih memberikan pengaruh secara kuat bagi sebagian besar masyarakat

Dalam kekuasaan sekuler, kita juga melihat betapa besarnya penghormatan yang ditunjukkan *Sultan Iskandar Muda* kepada ulama dalam masa pemerintahannya (1607-1636), dan jauh di atas *kaum uleebalang* sendiri. Bahkan, keberhasilan pembangunan di Aceh masa *Prof. A. Madjid Ibrahim* (wafat tahun 1981) dan masa *Prof. Dr. Ibrahim Hasan* (1987-1993), tidak terpisahkan dari kerjasama dengan para ulama.

Kasus-kasus lain juga dapat kita temui dalam kehidupan sosial di

tanah Jawa masa lampau. Salah satunya adalah peran yang dapat diambil *Sunan Kudus*, sebagaimana yang diceritakan *Graaf* (1985:26), dalam masa pergolakan politik kerajaan Demak pasca *Sultan Trenggana* (1546).

Dalam kasus tersebut, keberadaan Sunan Kudus lebih dimaksudkan sebagai pendamai dalam pertikaian politik antara elite kerajaan suksesor Demak seperti antara *Jaka Tingkir* dari Pajang dengan *Aria Penangsang* dari Jipang. Dalam meredam pertikaian ini, Sunan Kudus memanggil kedua elite kerajaan tersebut untuk datang kepadanya. Setelah "mendamaikan" dengan memarahi keduanya, lalu disuruh pulang dengan membawa nasihatnya untuk tidak melanjutkan perselisihan ini.

Hal ini merupakan contoh tentang betapa tingginya wibawa dan pengaruh seorang ulama terhadap masyarakat. Dalam suatu analisisnya *Fachry Ali* (1996:65) menggambarkan bahwa dalam kasus di atas terlihat secara mencolok terjadi demonstrasi supremasi kekuasaan (pengaruh) seorang tokoh spiritual, dan menunjukkan betapa tingginya wibawa ulama, yang bahkan

melampaui wibawa elite politik (negara).

Di penghujung abad ke-21 ini, kita tidak ingin menggambarkan tinggi wibawa ulama sebagaimana yang dialami para ulama Aceh masa lampau atau Sunan Kudus. Tetapi yang jelas, kedudukan ulama dewasa ini tidak serendah seperti yang uraikan *Elza Peldi Taher* dalam sebuah tulisannya (*Kompas*, 9/12/1988). Tetapi dalam masyarakat industrial ini, ulama (tokoh agama) masih tampak sangat berwibawa, disegani, dan dihormati masyarakat. Untuk itu maka peran melalui

kelesanan, keteladanan, dan partisipasinya secara konsisten dalam pembangunan spiritual masyarakat bangsa, masih menempatkannya sebagai komponen yang sangat penting, baik secara universal maupun di kalangan terbatas.

Selanjutnya adalah lingkungan pendidikan. Lembaga

yang kita maksud ini adalah lembaga yang mengorganisir proses sosialisasi secara terencana, apapun jenis dan tingkatannya, kecuali Pondok Pesantren yang memang telah diakui keampuhannya dalam masalah tersebut. Dalam lingkungan lembaga pendidikan, pengor-

dalam masyarakat industrial ini, ulama (tokoh agama) masih tampak sangat berwibawa, disegani, dan dihormati masyarakat

ganisiasian peran dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran guru agama sebagai komponen pokok. Mereka tentu harus dalam kualitas tertentu untuk mensosialisasi ajaran-ajaran agama kepada anak didiknya dan tidak hanya aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotor.

Aspek penunjang utama untuk mencapai keberhasilan ini adalah dengan mendayakan seluruh guru atau tenaga pengajar lain dalam suatu lembaga pendidikan. Mereka dituntut untuk dapat melaksanakan tugas juga dengan pendekatan yang agamis, apapun pelajaran yang diampunya. Keterpaduan ini, akan sangat membantu pencapaian terget sosialisasi nilai atau ajaran agama kepada anak didik sesuai dengan sistem keyakinan masing-masing. Dalam hal ini, tanggungjawab guru sama tingginya antara aspek kedinasan dengan tanggungjawab moral.

Sebagai pihak yang paling tinggi tanggungjawabnya dan sekaligus sebagai pelengkap adalah faktor orangtua (keluarga). Di sini dituntut langkah optimalisasi peran orangtua dalam proses pembentukan kepribadian anak, sebagai

pihak yang akan mengisi kehidupan sosial di masa datang, yaitu sebagai masa yang sama sekali berbeda dengan masa yang dijalani orangtuanya.

Dalam posisi yang demikian, orangtua tidaklah terbedakan secara nyata antara yang berpendidikan tinggi dengan yang rendah. Sebab, terutama masalah identifikasi keteladanan, pertama kali diperoleh anak justru dari orangtuanya, sekalipun ia bukan sebagai orang yang terpelajar. Bahkan, terbiasanya anak mengambil sesuatu dari orang lain dengan tangan kanan,

diperoleh atau diketahuhi anak dari pendidikan keluarganya, bukan dari sekolah atau ulama.

Optimalisasi peran (orangtua) yang dimaksud adalah keterlibatan keluarga dalam pendidikan anak, sekalipun tidak secara langsung berdiri sebagai pendidik dan terdidik. Sebab, pembiasaan-pembiasaan atau aspek

afektif dan psikomotor anak, terutama terhadap tatakrama dan nilai ajaran agama secara keseluruhan sebagai pelurus budi pekertinya, hanya mungkin berhasil apabila secara nyata di dukung dengan arahan dan dorongan dalam keluarganya.

terbiasanya anak mengambil sesuatu dari orang lain dengan tangan kanan, diperoleh atau diketahui anak dari pendidikan keluarganya, bukan dari sekolah atau ulama

Ketiga kalangan yang dikemukakan di atas, kiranya menjadi komponen yang sangat penting dalam mempersiapkan umat beragama menghadapi era perubahan yang tidak menentu ini. Apalagi, dalam millenium kedua nanti, sebagaimana yang diperkirakan *Naisbit* (1990:7), masyarakat dunia akan menghadapi persoalan-persoalan yang lebih kompleks dari yang sekedar dibayangkan.

Posisi Lembaga Pendidikan Islam

Berpijak pada kenyataan bahwa negeri Indonesia dihuni oleh sekitar 85% komunitas muslim, maka tidak terhindarkan lagi bahwa dalam hal ini keberadaan lembaga pendidikan Islam sangatlah jelas. Sebagai sosok lembaga yang menuntun terdidik secara kuat dengan azas normatif, maka untuk masa yang panjang lembaga pendidikan ini terbebankan tanggungjawab yang sangat berat.

Dalam memenuhi target jangka pendek, lembaga pendidikan Islam harus mampu memberikan arahan dan menuntun anak didik secara massal, untuk menjadi umat beragama (Islam) yang mampu menghadapi dan menjalani perubahan.

Sedangkan untuk jangka panjang, penekanannya adalah bahwa lembaga pendidikan tersebut harus mampu melahirkan ulama, pendidik, dan orangtua yang secara konsisten menunjukkan kemampuan dalam mengarahkan dan menuntun anaknya agar menjadi generasi berkemajuan dunia atas landasan keakhiratan. Untuk menjawab tantangan ini, lembaga pendidikan Islam bagaimanakah yang kita butuhkan?

Dalam menjelaskan kelembagaan untuk masa datang tersebut, kiranya masih tetap perlu dihindari

kerangka idealis, mengingat penetapan-penetapan aspeknya senantiasa tidak terlepas dari kebijakan dan penerapan politik pendidikan di negeri ini. Namun demikian, batas kesederhanaan yang dianut adalah batas yang dapat menempatkan lembaga pendidikan sekurang-kurangnya setara dengan

Berpijak pada kenyataan bahwa negeri Indonesia dihuni oleh sekitar 85% komunitas muslim, maka tidak terhindarkan lagi bahwa dalam hal ini keberadaan lembaga pendidikan Islam sangatlah jelas

perkembangan persoalan di sekitar masalah kehidupan sosial keagamaan masyarakat.

Sisi pertama yang cukup tertantang adalah masalah kualifikasi tenaga kependidikan. Aspek tersebut menuntut para pengampu lembaga pendidikan Islam, masa seka-

rang dan masa mendatang adalah mereka yang tidak hanya sekadar menguasai ajaran agama secara kontekstual, tapi juga tekstual dan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. Di sini harus ada kualifikasi yang cukup jelas mengenai kualitas yang harus dicapai. Sasaran peninjauan utama adalah lembaga-lembaga yang memproduksi tenaga kependidikan Islam.

Sisi lainnya adalah bahwa para pengampu yang *qualified* tersebut, harus membuktikan kemampuannya dengan menghindarkan proses pembelajarannya pada semata-mata pencapaian target kognitif. Sebab, aspek afektif dan psikomotor merupakan penentu tersosialisasinya ajaran-ajaran moral dan budi pekerti pada perkembangan perilaku anak didik, sebagai calon ulama, calon pendidikan, dan orangtua di masa datang.

Dalam konteks ini, maka keberadaan para pengampu disetiap jenjang pendidikan, lebih kuat tuntutan tanggungjawab moral dibanding tanggungjawab kedinasan. Jabatannya memang untuk mencari nafkah sebagaimana juga profesi-profesi lain (*Nasution*, 1982:132), tapi keberadaannya

dilingkari oleh tanggungjawab untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang sangat tegas menunjukkan sasaran moral, keterampilan, dan kecerdasan.

Ini merupakan tantangan yang harus terlebih dahulu dijawab. Jika persoalan tersebut dapat di atasi, maka diduga inovasi-inovasi dalam mengantarkan masyarakat beragama (Islam) pada umumnya, akan lebih tertanggulangi. Bukankah selama ini kita berasumsi, bahwa perubahan itu perlu dan menjadi wujud perbaikan kualitas hidup yang harus dicapai umat manusia.

Tetapi perubahan memberi dampak negatif dalam masyarakat, itu lebih dikarenakan oleh ketidaksiapan masyarakat itu sendiri, sehingga terjadi keterkejutan-keterkejutan yang paradoks dengan nilai budaya dan sistem keyakinan.

Kepustakaan

Ali, Fachry, 1996, "Kewibawaan Pendidikan Islam Sebagai Fenomena Pemberdayaan Umat" dalam *Jurnal Pendidikan Islam* Nomor 2 tahun I 1996, Yogyakarta : Fakultas Tarbiyah UII Yogyakarta.

de'Graaf, H.J., 1985, *Awal Kebangkitan Mataram, Masa Pemerintahan Se-*

**Dalam konteks ini,
maka keberadaan
para pengampu
disetiap jenjang
pendidikan, lebih
kuat tuntutan
tanggungjawab
moral dibanding
tanggungjawab
kedinasan**

- nopati Jakarta : PT Graffiti Pers.
- Durkheim, Emile, 1964, *The Division of Labor in Society*, New York : The Free Press.
- Galtung, Johan, "Suatu Teori Struktural Tentang Imperialisme", dalam Amir Efendi Siregar (Editor), 1991, *Arus Pemikiran Ekonomi Politik*, Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Kuntowijoyo, 1987, *Budaya dan Masyarakat*, Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Naisbit, John dan Patricia Aburdene, 1990, *Megatrend 2000*, Jakarta : Binarupa Aksara.
- Nasution, S., 1982, *Sosiologi Pendidikan*, Bandung : Jemmars
- Taher, Elza Peldi, "Pudarnya Citra Ulama" dalam *KOMPAS*, 09/12/1988.